**BAB II**

**KONDISI BANGSA INDONESIA**

**PADA MASA ORDE LAMA TAHUN 1945 M- 1953 M**

1. **Kondisi Ekonomi**

Tanggal 6 bulan Agustus tahun 1945 M, kota Hiroshima di bom atom oleh Sekutu, menyusul pada tanggal 9 Agustus 1945 M, kota Nagasaki pun mengalami hal yang serupa. Maka Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Di Indonesia peristiwa ini mebuka peluang sejarah bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan.Masa kekosongan kekuasaan di Indonesia pun dimulai, para pemimpin bangsa Indonesia dengan cerdas memanfaatkan peluang tersebut.Sementara itu, kondisi ekonomi pada masa kemerdekaan terjadi kerusakan yang luar biasa terhadap aset produktif di dalam negeri.[[1]](#footnote-1)

Indonesia dalam keadaan ekonomi yang kacau, pihak Belanda datang dengan sasaran strategis menguasai kembali aset-aset produktifnya dalam keadaan baik, sebaliknya taktik Republik Indonesia adalah membumi hanguskan aset-aset sebelum sempat dikuasai Belanda.Ini semua mempunyai implikasi luas bagi Indonesia ini sewaktu memasuki masa damai pada dasawarsa berikutnya. Tingkat kerusakan yang terjadi selama dasawarsa 1940-an digambarkan oleh seorang ahli sejarah ekonomi. Persoalan yang dihadapi Indonesia pada tahun 1950 digambarkan secara ringkas dalam laporan yang disusun oleh De Javasche Bank tiga tahun sebelumnya sebagai bagian dari permohonan Belanda untuk mendapatkan Marshall Aid (bantuan pembangunan dari Amerika). Dokumen ini menekankan bahwa tidaklah mungkinuntuk mengukur secara lengkap kerusakan fisik yang dialami Indonesia selama dan sesudah perang.Tetapi dokumen itu menyebut angka perkiraan kerugian dua miliar dolar dihitung dalam nilai dolar pada tahun 1939.[[2]](#footnote-2)

31

Kapasitas Produksi Beberapa Sektor Ekonomi Sebagai Presentase

Sekitar Tahun 1947

|  |  |
| --- | --- |
| Sektor | (%) |
| Tanaman Pangan | 70-75 |
| Perekonomian Rakyat | 30-35 |
| Perkebunan Besar | 20-25 |
| Perikanan | 50 |
| Pertambangan | 20 |

Masa revolusi juga ditandai oleh dua perkembangan lain, yaitu *inflasi* dan *pergerakan penduduk* yang luar biasa antar daerah kota dan desa. Inflasi timbul karena adanya kelangkaan kronis barang-barang kebutuhan masyarakat dan penambahan uang beredar yang tidak terkendali.Kelangkaan kronis barang kebutuhan rakyat adalah konsekuensi langsung dari turunnya kapasitas produksi, terganggunya kegiatan rutin produksi sehari-hari dan terhentinya ekspor impor karena blokade Belanda.Sedangkan pertumbuhan uang bersumber dari percetakan uang dari Republik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan perjuangan yang terus meningkat.Karena defisit anggaran terus menerus yang hanya bisa ditutup dengan mencetak uang baru. Pada waktu itu institusi-institusi normal pengumpul pendapatan negara Pajak, Bea masuk, Cukai, dan lain sebagainya tidak berfungsi.[[3]](#footnote-3)

Tahun 1947 beredar tidak satu mata uang, tapi beberapa secara bersamaan ada pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Indonesia, ada uang Indonesia yang dikeluarkan pemerintah daerah, ada uang sisa-sisa pendudukan Jepang, dan ada uang yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank. Masing-masing mempunyai nilai tersendiri terhadap barang.Kepercayaan orang pada masing-masing mata uang berbeda pula.Yang paling kurang dipercaya biasanya tidak lama disimpan oleh pemegangnya dan secepatnya dibelanjakan.[[4]](#footnote-4) Uang De Javasche Bank yang banyak diminati masyarakat atau dipercaya dan menjadi pilihan masyarakat untuk dipegang atau disimpan.

1. **Kondisi Sosial**

Pasca kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupa masyarakat Indonesia. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, dalam kehidupan bangsa Indonesia telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Dalam bidang sosial, pemeintah menghapuskan segala bentk diskriminasi seperti dalam struktur sosial zaman Belanda. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama,yang mana masyarakat Indonesia di dominasi oleh warga Belanda dan Jepang, sehigga warga pribumi hanyalah masyarakat rendah yang kebanyakan menjadi budak dari bangsawan dan penguasa. Tetapi, setelah tanggal 17 Agustus 1945 segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan. Semua warga Negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.[[5]](#footnote-5)

Dengan adanya landasan itulah yang menjadikan misi utama yaitu menitik beratkan pembangunan awal dibidang pendidikan yang mana telah dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Begitu juga dengan di adakannya revolusi sosial yang bersifat demokratis, bernegara dan berkedaulatan.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus disosialisasikan. Dalam bidang sastra lahir angkatan 45 yang di pelopori Chairil Anwar dan Idrus. Dalam bidang seni music, lahir komponis-komponis berbakat yang meciptakan lagu-lagu yang bertema nasionalisme dengan tujuan untu memanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Seni luki juga berkembang yang di pelopori oleh Sudjoyono, Djaja Sumita, dan rusli. Seni drama Film diplopori oleh Dr. Huyung, Umar Ismali dan lain sebagainya dan berkembang juga media komuiasi terutama surat kabar dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 dengan Mr. Soemanang sebagai ketuanya.

1. **Kondisi Politik**

Bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air Indonesia, bahkan telah beratus-ratus tahun. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya dalam perjuangan, tetapi jiwa rakyat Indonesia tetap menuju kearah kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan Jepang. Tibalah saatnya rakyat Indonesia menuju suatu kebebasan dari penjajahan, khususnya pada saat Jepang menyerah kepada sekutu.Ketika pejuang Indonesia mengetahui bahwasannya Jepang telah menyerah terhadap sekutu, Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya.[[6]](#footnote-6)

Setelah Indonesia merdeka, kesibukan selanjutnya adalah menyusun tatanan mengenai kehidupan kenegaraan.Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitui rapat yang pertama sesudah Proklamasi.Pada waktu itu Soekarno-Hatta merencanakan untuk menambah sembilan orang anggota baru, termasuk dari golongan pemuda termasuk Sukarni, Chaeru Saleh dan juga wikana.Tetapi setelah berlangsungnya pembicaraan yang kurang memuaskan antara Mohammad Hatta dan Chaeru Saleh, para pemuda meninggalkan tempat karena masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr Kasman Singodimedjo, Mr Teuku Mohammad Hassan untuk membahas masalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluk”, karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut.[[7]](#footnote-7)

Soekarno ingin memprakarsai pembentukan satu sistem partai, semacam partai negara dengan nama PNI.Partai PNI didirikan pada tanggal 23 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Bung Karno dan Hatta, dan dengan anggotanya adalah Iwa Kusumasumantri, Sayuti Melik, Mr. A.A. Maramis, Oto Iskandardinata, Wondoamiseno, Abikusno, Sukarjo Wirjopranoto, Dr. Sukiman, Mr. Sartono, Mr. Latuharhari, M. Tabrani, S.E. Trimurti, A. Baswedan, Lim Koen Hian, dan P.F. Dahler. Sukarni, Wikana, Sudiro, dan Dr. Mawardi. PNI kemudian dibubarkan. Karena khawatir akan tindakan Sahrir yang anti Jepang dan menuduh gagasan satu partai seperti Nazi.[[8]](#footnote-8)

KNIP (Komite Nasional Inodnesia Pusat) semacam parlemen darurat dibentuk, dan presiden Soekarno mementuk kabinet pertama pada tanggal 31 Agustus 1945.Kabinet presidentil pertama dipimpin oleh Mohammad Hatta yang terdiri dari unsur-unsur nasionalis moderat dan nasionalis radikal, Tan Malaka.Sutan Sahrir dengan golongannya yang bergerak di bawah tanah agak kecewa dan menuduh kabinet pertama adalah Fasis. Kaum komunis yang mulai juga muncul dari persembunyiannya mendukung usaha Sutan Sahrir untuk mengusir golongan Tan Malaka. Presiden Soekarno yang mau mengambil hati golonga resistensi, mendekati SutanSahrir. KNIP yang beranggotakan 150 orang, ditambah dengan 33 dari golongan Sjahrir, 15 diantaranya masuk badan pekerja,Sutan Sahrir diangkat menjadi ketua dan Amir Sjaripudin sebagai wakilnya. Tanggal 10 November 1945 dengan dekrit Wakil Presiden No. X, Moh. Hatta mengumumkan sistem multipartai.Partai Masjumi lahir pada tanggal 7 November 1945, sedangkan PNI tanggal 29 Januari 19. PNI mula-mula lahir dengan nama Sarekat Rakyat Indonesia pada tanggal 11 September 1945 di bawah pimpinan S. Mangun Sarkoro, Mr. Lukam Hakim, Mr. Sunarjo, Mr. Iwa Kusumasumantri, Osa Maliki, Suwirjo, dan Sultan Makmur.[[9]](#footnote-9)

Sesudah mengadakan kongres dengan berbagai organisasi cabang, misalnya Partai Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Partai Republik Madiun dan Cabang-Cabang Sulawesi, Palembang Nusa Tenggara, dan lain-lainnya. Misalnya di Kediri pada tanggal 28 Januari 1946 dibentuklah PNI.Sehari kemudian yaitu pada tanggal 29 Januari1946. Tersusunlah perhimpunan partaidi bawah pimpinan S. Mangun Sarkoro sebagai ketuanya, yang beranggotakan Mr. Jodi Gondo Kusumo, Sidik Joyo Sukarto, Dr. A.K. Gani, A.S. Pelo, M. Ghajali, Manai, Mr. Sartonon Mr. Lukman Hakim, Sudiro, Samsudin, Sultan Makmur dan Murjodo.

Sejak KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945.Republik Indonesia merdeka mulai berjalanberdasarkan Undang-Undang 1945.Sebelum KNIP dibentuk, Soekarno mengadakan pidato radio dengan acara “bulat bersatu” menghadapi masa datang. Pokok isinya ialah “ kita mau menjadi bangsa merdeka, diakui atau tidak oleh bangsa asing”.

Pada rapat KNIP dipilih Mr. Kasman Singodimejo sebagai Ketuanya.KNIP mengesahkan keputusan dan pengangkatan yang dilakukan sejak PPKI atau Panitia Persiapak Kemerdekaan Indonesia membubarken dirinya.Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 telah menetapkan daerah Republik Indonesia.Untuk sementara waktu, daerah Negara Republik Indonesia dibagi kedalam delapan Provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Provinsi-provinsi tersebut ialah :Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawaesi, Sunda Kecil, Maluku.[[10]](#footnote-10)

Daerah provinsi dibagi kedalam keresidenan, yang dikepalai oleh soerang Residen, dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Untuk sementara waktu kedudukan kota dan sebagainya diteruskan sesuai pada Zaman Kolonial. Untuk sementara waktu, kedududkan *Kooti*(Daerah Istimewa) dan sebagainya diteruskan sesuai pada Zaman Kolonial.[[11]](#footnote-11)

Susunan pemerintahan pusat di bawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden disusun sebagai berikut:

Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusuma

Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subardjo

Menteri Kehakiman : Prof. Dr Soepomo

Menteri Kemakmuran : Ir. R.P. Soerahman

Menteri Keuangan : Dr. Samsi Sastrowidagdo

Menteri Kesehatan : Dr. Guntaran Martoatmodjo

Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara

Menteri Sosial : Mr. Iwa Kususma Sumanteri

Menteri Pertahanan : Belum diangkat

Menteri Penerangan : Mr. Amir Sjarifudin

Menteri Perhubungan : R. Abikusno Cokrosujoso

Menteri-Menteri Negara : Dr. Amir, Wahid Hasyim Mr. Sartono Mr. A.A. Maramis, Oto Iskandardinata.

Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusuma Atmadja

Jaksa Agung : Mr. Gatot

Sekretaris Negara : Mr. Gafar Pringgodigdo

Juru Bicara Negara : R. Sukarejo Wirjopranoto.[[12]](#footnote-12)

Keamanan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia saat itu terancam ketika pasukan Inggris masuk ke Jakarta dengan membawa pasukan Belanda pada 10 Oktober 1945, yang pasukannya kebanyakan terdiri dari pasukan KNIL(orang Ambon). Pasukan Inggris mengibarkan bendera Belanda untuk menunjukan bahwa kekuasaan Belanda di Nederlands Indie sudah dikembalikan.[[13]](#footnote-13)

Banyaknya serangan politik yang mengincar Seokarno dan Hatta dan selalu dicela sebagai kolabolator Jepang,maka menghindari intervensi tersebut usulan dari badan Pekerja bahwa maka sementara waktu dalam upaya menangkis serangan-serangan politik tersebut, mereka mengusulkan adanya Kabinet Parlementer.Maka pada tanggal 14 Novenber 1945 Soekarno mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana Mentri Parlementer.Sutan Sjahrir dan kawan-kawannya dari Partai Sosial berpendapat bahwa Kabinet Republik Indonesia di bawah pimpinannya Sutan Sjahrir memudahkan berunding dengan Belanda.[[14]](#footnote-14)Susunan Kabinet Parlementer Sutan Sjahrir adalah sebagai berikut:

Perdana menteri : Sutan Sjahrir

Menteri Luar Negeri : -

Menteri Dalam Negeri : -

Menteri Penerangan : Mr. Sjafruddin

Menteri Keamanan : -

Menteri Keuangan : Mr. Soenarjo Kolopaking

Menteri Perhubungan : Ir. Abdul Karim

Menteri Kesehatan : dr. Darmasetiawan

Menteri Sosial : dr. Ajidarmo

Menteri Kehakiman : Mr. R. Suandi

Menteri P dan K : Ir. Putuhena

Menteri Kemakmuran : Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo

Menteri Agama : H. Rasyidi

Pada akhir Bulan Desember 1945 Jakarta sudah mulai tidak aman lagi karena tentara Belanda mulai memasuki Jakarta. Sehingga resiko mempertahankan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan sangat besar. Pada tanggal 4 Januari 1946 presiden Sokarno dan wakil presiden Moh Hatta dengan keluarga dan staf pindah ke Yogyakarta, yang sementara waktu dijadikan ibu kota Republik Indonesia.[[15]](#footnote-15)

Pemisahan pemerintahan ini ternyata melemahkan posisi Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Lawan-lawannya di Yogyakarta berhasil mengerahkan oposisi terhadap dirinya secara efektif, mereka terhindar dari beratnya kenyataan tekanan langsung kekuatan Belanda, sehingga terlihat bahwa pendiri politik tidak kenal kompromi adalah sikap yang realistik. Ketika persatuan perjuangan melancarkan kritiknya atas konsensi-konsesi yang diduga diberikan pemerintahan di meja perundingan, Sutan Sjahrir akhirnya memutuskan mengundurkan diri pada akhir Februari tahun 1946 .[[16]](#footnote-16)

Pengunduran diri Sutan Sjahrir menempatkan inisiatif langsung berada ditangan presiden Sukarno.Presiden Sukarno menawarkan pembentukan kabinet kepada Persatuan Perjuangan (PP) yang oposisinya telah membawa jatuhnya Sutan Sjahrir, dan ini sesuai dengan kebijakan konstitusional yang disetujui bulan November tahun 1945. Ternyata tidak demikian.Dengan mengikuti suara hatinya sendiri Soekarno mengumpulkan sejumlah menteri dalam suatu kabinet koalisi yang sebagaian besar terdiri dari lawan-lawan Sutan Sjahrir.[[17]](#footnote-17)Tetapi tidak mengubah politik Sutan Sjahrir dalam mencari penyelesaian dengan Belanda.Tetapi pimpinan Persatuan Perjuangan menolak memberikan nama-nama mentrinya kecuali di atas dasar program politik oposisi yang tidak berkompromi terhadap perundingan.Dengan demikian Soekarno kembali lagi kepada Sutan Sjahrir.

Pada tanggal 2 Maret 1946 Sutan Sjahrir membentuk kabinet lagi, Tan Malaka merasa dikecewakan oleh Presiden Soekarno kemudian mengadakan adanya perebutan kekuasaan. tetapi Tan Malaka ditahan bersama pengikutnya antara lain Moh Yamin dan Chairul Saleh pada tanggal 17 Maret 1946. Penangkapan terhadap ketiga tokoh tersebut menimbulkan kegoncangan di Solo antara Barisan Banteng dan Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO).

Pada tanggal 25 Juni 1946 diumumkan bahwa dalam waktu seminggu kepolisisan akan dipindahkan otoritasnya dari Departemen Dalam Negeri ke Perdana Menteri. Tan Malaka semakin curiga bahwa hal itu akan ditunjukan terhadapnya. Sementara Bung Karno menetap ke Tawangmangun untuk beberapa lama.Jenderal Sudarsono Panglima TNI di Yogyakarta dua hari kemudian membebaskan Tan Malaka dari penjara, atas prakarsa sendiri.Sore itu juga pada tanggal 28 Juni 1946 Sutan Sjahrir dan 3 Menteri diculik, di Solo.Presiden Soekarno mengutuk penculikan itu sebagai tindakan mero Republik Indonesia, suatu percobaan untuk menculik Amir Sjarifudin pada tanggal 3 Juli 1946 gagal.[[18]](#footnote-18)

Presiden Soekarno memerintahkan penangkapan oknum tersebut, Jendral Soedarsono, dan menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Soekarno. Rencana perebutan kekuasaan oleh Tan Malaka menuai kegagalan, dan para pelaku terta pengikutnya antara lain Soebardjo, Iwa Kusumasumantri, Sukarni, Adam Malik, Soemantoro ditahan.[[19]](#footnote-19)

Sutan Sjahrir sudah lega dari oposisi tersebut, dan bebas melaksanakan rencananya untuk melaksanakan perundingan dengan Inggris dan Belanda. persetujuan di Linggarjati pun akhirnya dicapai pada tanggal 16 Oktober 1946. Isinya antara lain adalah penarikan kembali pasukan Inggris, pengakuan secara *De Facto* atas Kedaulatan Republik Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera.[[20]](#footnote-20)

Pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949 yang meliputi seluruh wilayah jajahan Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Negara secara simbolik. Pengembalian semua milik kepada Belanda.[[21]](#footnote-21) dukungan dari Indonesia datang terutama dari golongan kiri. MASJUMI dan PNI menolak persetujuan itu, dan mereka bersama membentuk “Benteng Republik”, untuk memblok persetujuan itu dalam KNIP nanti.Sebagai jawaban, sayap kiri membentuk blok baru terdiri dari Sosialis, Buruh, Barisan Tani Indonesia( BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) dan Partai Komunis, tetapi dengan(MASJUMI0 dan PNI sebagai oposisi.[[22]](#footnote-22)

Amir Sjarifudin yang dikira sebagai nasionalis kiri atau sosialis ternyata masuk partai Sjarir sebagai wakil ketua.beberapa anggota lainnya seperti Tan Ling Djie, Abdul Majid dan Wikana pemimpin Persindo. Dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)[[23]](#footnote-23) ada Harjono, Njono, Oei Goe Huat.Sedangkan (BTI) Barisan Tani Indonesia dipimpin oleh Sajarwo. Sayap kiri semakin kuat dengan pengaruh komunis.Dan komunis menganggap sudah siap untuk meraih kepemimpinan nasional melalui rong-rongan dan merobohkanSutan Sjahrir. Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), Sarjono mulai menolak konsepsi Sutan Sjahrir dan partai-partai buruh dan sosialis lainnya serentak mengikutinya.

Tanggal 26 Juni 1947 Sutan Sjahrir merasa sudah tidak sanggup melanjutkan kepemimpinanya akan tetapi presiden Soekarno medesak Sutan Sjaharir untuk tetap pada jabatannya,[[24]](#footnote-24) Tetapi hasilnya Sutan Sjahrir tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Kabinet. Akhirnya presiden Soekarno menunjuk Amir Sjarifudin sebagai Ketua Kabinet dan Ali Sastroamidjojo sebagai wakilnya dengan dukungan dari KNIP.[[25]](#footnote-25)

Akan tetapi setelah presiden Soekarno menunjuk Amir Sjarifuddin sebagai Ketua Kabinet tahun 1946, berbagai persoalan pun bermunculan.Amir Sjarifuddin dituntut tiga permintaan oleh pemerintah kolonial Belanda atas konsekuensi tunutuan yang belum terselesaikan pada masa kabinet Sjahrir.Namun dua tuntutan tersebut ditolak oleh Amir Syarifuddin, penolakan tersebut akhirnya tidak bisa mencegah terjadinya kontak senjata dengan pemerintah Belanda.Pada tanggal 20 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan serangan-serangan secara polisionil atau secara kekerasan.Akhirnya, pada tanggal 19 Januari 1948 proses gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pun terjadi di atas kapal U.S.S. Renville, yang sering disebut dengan perjanjian Renville.

Perjanjian Renville selesai, gejolak didalam tubuh kabinet pun terjadi, yang mengakibatkan terjadinya krisis kabinet.Amir Sjarifuddin meletakkan jabatannya pada 23 Januari 1948. Dalam keadaan darurat tersebut presiden Soekarno harus menunjuk kembali ketua kabinet pengganti Amir Sjarifuddin.Maka presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta untuk memimpin suatu “Kabinet Presidentil” yang darurat (1948-1949).

Akan tetapi, Republik Indonesia Serikat dibawah pimpinan kabinet Mohammad Hatta belum memperoleh keberhasilan yang maksimal persoalan yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan kabinet Amir Sjarifuddin di luar negeri masih terus berlanjut.Namun tak lama setelah itu, pada tahun 1948 persoalan didalam negeri pun ikut bergejolak. Partai PKI dibawah pimpinan Musso melakukan rencana makar terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan daerah Madiun sebagai basis pasukan gerilya atau pertahanan gerilya jangka panjang.[[26]](#footnote-26) Dengan instruksi dari Moskow[[27]](#footnote-27), Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan infiltrasi ke daerah-daerah Madiun melalui berbagai aksi, seperti: pemberontakan dan pembentukan *Republik Sovyet-Indonesia*. Selain itu, partai PKI juga mendorong kaum buruh dan para petani untuk melakukan pemogokkan masal.Akan tetapi, aksi tersebut akhirnya dapat diatasi pada tanggal 19 September 1948.

Peristiwa Madiun setelah usai, Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan lagi ancaman yang serius bagi Republik Indonesia dan para pemimpinnya hingga tahun 1949.Bersamaan dengan hal itu pula pada tanggal 27 Desember 1949, negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia (tidak termasuk Papua) kepada RIS. Tetapi setelah penyerahan kedaulatan wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) terjadi banyak gejolak didalam negeri yaitu pembentukkan Negeri Pasundan, Republik Maluku Selatan, Sumatera Timur serta Indonesia Timur, tetapi semua pergolakan tersebut akhirnya dapat teratasi dengan cara operasi militer dan strategi kooperatif atau dengan cara diplomasi.[[28]](#footnote-28) Akhirnya pada saat peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang kelima pada tanggal 17 Agustus 1950 kedaulatan Republik Indonesia diakui secara penuh (tidak termasuk papua) dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara.[[29]](#footnote-29)

Indonesia akhirnya merdeka, dalam perspektif hukum internasional atau diakui sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kini menghadapi tujuan awal untuk menentukan masa depannya sendiri.[[30]](#footnote-30)Tetapi didalam tubuh kabinet Republik Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh Hatta digantikan oleh Muhammad Natsir yang mulai dilantik pada tanggal 7 September 1950.[[31]](#footnote-31)Didalam kabinet Natsir persoalan Republik Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar.Dikarenakan pemerintahan Natsir hanya bertahan selama 7 bulan yaitu pada tanggal 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951.Upaya dalam menentukkan kebijakan luar negeri adalah bebas dan netral.Tetapi, bersimpati kepada negara-negara barat.Pada bulan September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[[32]](#footnote-32)Namun Kabinet Natsir mengalami kegagalan.Kegagalan ini adalah perundingan dengan Belanda tentang masalah Irian Barat, yang mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada Kabinet Natsir diParlemen.

Pada tanggal 27 April 1951 Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Soekiman. Pada masa pemerintahan Kabinet Soekiman menjadi pukulan yang cukup menyakitkan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), karena pada masa itu terjadi penumpasan PKI. Selain itu, kaum komunis mulai menjadi marah dengan bergabungnya PNI dan Masyumi.[[33]](#footnote-33)Sedangkan, masalah politik luar negeri yaitu adalah penanganan masalah keamanan dalam negeri.Indonesia memihak Blok Barat dengan menandatangani *Mutual Security Act* dengan pemerintah Amerika Serikat.[[34]](#footnote-34)

Akan tetapi, belum genap 1 tahun Kabinet Soekiman sudah digantikan oleh Kabinet Wilopo yang memangku jabatan dari tanggal 3 April 1952 sampai dengan tanggal 3 Juni 1953.Dalam Kabinet Wilopo persoalan mengenai gejolak di dalam negeri belum terselesaikan yaitu munculnya gerakan separatis di daerah Sumatera dan Sulawesi.Selain itu tuntutan atau Mosi dari Sarekat Tani Indonesia dan akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953.Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.[[35]](#footnote-35)

1. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2016) P.71. [↑](#footnote-ref-1)
2. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*. PT. Mizan Pustaka, Bandung 2016...,p.72. [↑](#footnote-ref-2)
3. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*...,P.72. [↑](#footnote-ref-3)
4. Boediono,*Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*...,P.73. [↑](#footnote-ref-4)
5. Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V...,P*.74 [↑](#footnote-ref-5)
6. Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia...,P*.95. [↑](#footnote-ref-6)
7. Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993) P.96. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai.* (Jakarta : C.V. Sri Murni, 1988) P.19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai.* (Jakarta : C.V. Sri Murni, 1988) P.19 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mohammad Hatta, *Menuju Gerbang Kemerdekaan,* ( Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2011) P.103*.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Mohammad Hatta, *Menuju Gerbang Kemerdekaan...,*P.105. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mohammad Hatta, *Menuju Gerbang Ke Merdekaan..., P*.107. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mohammad Hatta, *Menuju Gerbang Ke Merdekaan*...,P. 108. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mohammad Hatta, *Menuju Gerbang Ke Merdekaan*...,P.124. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai.* (Jakarta : C.V. Sri Murni, 1988), p.28. [↑](#footnote-ref-15)
16. John D. Legge, *Sukarno Biografi Politik* (Jakarta : CV Mitra Sari, 2001) P.253. [↑](#footnote-ref-16)
17. John D. Legge, *Sukarno Biografi Politik*...,P.253. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai...,*P.29. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai...,*P.29. [↑](#footnote-ref-19)
20. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*...,P.29. [↑](#footnote-ref-20)
21. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*p.471. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*...,P.30. [↑](#footnote-ref-22)
23. SOBSI Adalah Sentral Organisasi Buruh Indonesia Lihat. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur...,*P.404. [↑](#footnote-ref-23)
24. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai...,*P.31. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lihat. John D. Legge, *Sukarno Biografi Politik*...,P.259., Untuk Struktur Kabinet Yang Dipimpin Oleh Amir Sjarifuddin, Lihat. Nugroho Notosusanto, *Sejarah Indonesia*...,P.142. [↑](#footnote-ref-25)
26. Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai...P*.38-39. Dan M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*(Jakarta: Seambi, 2010),P.479-480. [↑](#footnote-ref-26)
27. Musso Pernah Mengunjungi Moskow, Rusia, Untuk Suatu Kunjungan Rahasia Pada Tahun 1935, Lihat. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*P.479. [↑](#footnote-ref-27)
28. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*p.488-489. [↑](#footnote-ref-28)
29. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*p.489-490. [↑](#footnote-ref-29)
30. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*p.493. [↑](#footnote-ref-30)
31. Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia,* (Yogyakarta: Diva Press, 2014),p.372. [↑](#footnote-ref-31)
32. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*p.504. [↑](#footnote-ref-32)
33. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...,*p.505. [↑](#footnote-ref-33)
34. Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia...,*p.373. [↑](#footnote-ref-34)
35. Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia...,* P.218. [↑](#footnote-ref-35)